

IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA KARANG TARUNA MANDIRI KELURAHAN JATISARI DALAM PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMUDA DI LINGKUNGAN KELURAHAN JATISARI KOTA BEKASI TAHUN 2021

Dimas Adang Ferandi
Universitas Krisnadwipayana
ferandidimas9@gmail.com

Submitted: 17/10/2021; Revised: 21/11/2021; Published: 31/12/2021

Abstract

Karang Taruna is a social community organization located in a sub-district or village to develop members in this community to grow and thrive based on awareness and social responsibility on youth. Therefore, a researcher raised two main issues regarding the implementation work program Karang Taruna Mandiri Jatisari Village, Bekasi City, and the obstacle factor realization Karang Taruna Mandiri program in Jatisari Village, Bekasi City. The research method used in this study is the qualitative approach method, that is technique collect data based on facts obtained from direct observation, interview with an informant, and documentation as evidence of the research was already done. In qualitative research, there is also have a data analysis technique that is conducted when data collection is in progress.

Keywords: *Empowering, Youth Organization*

Pendahuluan.

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda atau pemuda di wilayah desa atau kelurahan yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Karang Taruna beranggotakan pemuda dan pemudi yang diatur dalam AD/ART keanggotaannya mulai dari pemuda dan pemudi berusia mulai dari 11 - 45 tahun dan batasan sebagai pengurus berusia 17 - 35 tahun. Karang Taruna didirikan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, ketrampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian.

Karang Taruna sangat berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Sabtu 14 Januari 2017, Walikota Bekasi Rahmat Effendi membuka rapat kerja pertama Karang Taruna Kota Bekasi periode 2016 -2021 di Gedung Graha Tirta Jatiluhur Purwakarta. Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan bahwa Karang Taruna adalah mitra pemerintahan daerah pada bidang pembangunan. Rahmat Effendi kembali menyampaikan Karang Taruna adalah generasi -generasi muda nonpartisipan yang tumbuh dan berkembang atas dasar tanggung jawab sosial pada wilayah Kota, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT, dan komunitas. Karang Taruna adalah bentuk organisasi sosial yang bertujuan sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan kegiatan ekonomi produktif di lingkungan Kelurahan, Kecamatan, RW, dan RT. Rapat kerja pertama Karang Taruna Kota Bekasi periode 2016 -2021 dihadiri oleh seluruh ketua Karang Taruna se -Kota Bekasi.

Dalam agenda rapat kerja pertama Karang Taruna Kota Bekasi periode 2016 - 2021, ketua Karang Taruna Kota Bekasi Ismail Hasim menemukan permasalahan mengenai program kerja ketiga Karang Taruna Kota Bekasi. Permasalahan yang dibahas terkait program kerja ketiga pada rapat ini mengenai laporan pertanggung jawaban Karang Taruna Kota Bekasi pada periode sebelumnya. Karang Taruna Kota Bekasi periode sebelumnya tidak dapat menunjukkan hasil laporan pertanggung jawaban kepada Karang Taruna Kota Bekasi periode 2016 -2021 mengenai dana APBD untuk segala acara dan kegiatan Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan se -Kota Bekasi.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, Ismail Hasim ketua Karang Taruna Kota Bekasi periode 2016 -2021 mengambil sebuah keputusan. Pertama, menjalankan dua program kerja yang telah dibahas yaitu Bank Sampah dan menghasilkan program -program sosial pada Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan se - Kota Bekasi. Kedua, ketua Karang Taruna Kota Bekasi tidak akan mengeluarkan dana APBD untuk segala acara dan kegiatan Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan se - Kota Bekasi pada periode 2016 -2021 karena terkendala dengan laporan pertanggung jawaban Karang Taruna Kota Bekasi periode sebelumnya. Ismail Hasim ketua Karang Taruna Kota

Bekasi periode 2016-2021 menyampaikan, apabila pada periode ini dana APBD untuk Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan se -Kota Bekasi kembali dikeluarkan, dikhawatirkan akan kembali menimbulkan permasalahan yang sama seperti pada kepengurusan Karang Taruna Kota Bekasi periode sebelumnya.

Salah satu Karang Taruna Kelurahan yang menerapkan hasil dari rapat kerja Karang Taruna se -Kota Bekasi adalah Karang Taruna Kelurahan Jatisari dengan program kerja Karang Taruna Mandiri. Program Karang Taruna Mandiri adalah program kerja Karang Taruna Kelurahan Jatisari yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas generasi muda dengan membuat atau menghasilkan sebuah produk dapat berupa barang maupun jasa yang nantinya dari produk tersebut mampu menghasilkan sebuah penghasilan yang akan dipergunakan untuk menjalankan roda perekonomian dan keberlangsungan organisasi Karang Taruna. Program Karang Taruna Mandiri ini diperuntukan untuk seluruh Karang Taruna sub unit RW yang ada di Kelurahan Jatisari. Adapun bentuk pengaplikasian dari program Karang Taruna Mandiri. Bentuk pengaplikasian yang pertama adalah berdagang.

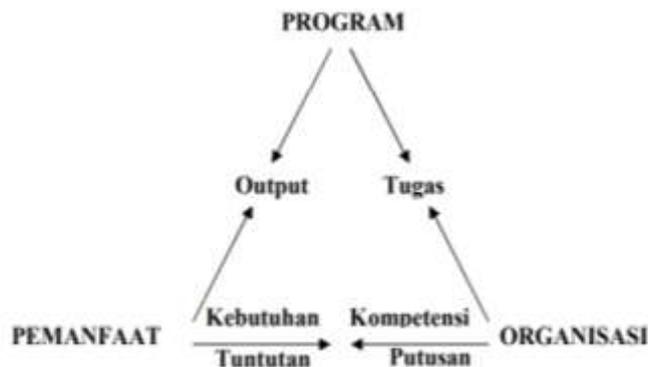
Seperti contoh Karang Taruna sub unit RW menghasilkan produk pencuci piring dan sablon baju. Dari produk pencuci piring dan sablon baju, Karang Taruna dapat menjual dan memasarkan hasil produknya kepada warga di lingkungan masing-masing. Bentuk pengaplikasian yang kedua adalah petugas pelayanan pembayaran tagihan PBB, pembayaran listrik, beli pulsa, pembayaran tagihan PDAM, dsb. Petugas yang akan melayani segala jenis pembayaran tagihan PDAM, PBB, dll dapat dilakukan oleh Karang Taruna sub unit RW.

Ada berbagai keuntungan yang didapatkan dari program Karang Taruna Mandiri. Pertama, dari kegiatan menjadi petugas pelayanan pembayaran tagihan PBB, PDAM, dll, Karang Taruna mendapatkan pembelajaran mengenai cara melayani masyarakat dengan baik, sopan, bertanggung jawab, dan melakukan pelayanan secara cepat pada pelayanan pembayaran tagihan PBB, PDAM, dll. Kedua, Karang Taruna akan mendapatkan keuntungan berupa dana yang dihasilkan dari penjualan produk pencuci piring dan sablon baju dan keuntungan dari pembayaran tagihan PBB, PDAM, dll. Ketiga, dari hasil keuntungan yang diperoleh Karang Taruna dapat memasukan sebagian keuntungan ke dalam kas Karang Taruna sub unit RW dan sebagian yang lain dimasukan ke dalam kantong pribadi

Tinjauan Pustaka

Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, Jones menyebutkan implemetasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu: (1) Pengorganisasian Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, (2) Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, (3) Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan tujuan, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang ditentukan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pengguna dengan organisasi pelaksana, Tuntutan Putusan program pemanfaatan organisasi.



Pemberdayaan Organisasi Pemuda

Dalam pengertian yang diberikan terhadap pemberdayaan, jelas dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan”. Dalam praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam penyelesaian kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*Income generating*).

Teori tersebut apabila dikaitkan kedalam konteks organisasi kepemudaan, maka pemberdayaan organisasi kepemudaan dapat didefinisikan sebagai proses menumbuhkan kesadaran dan sebagai cara untuk memotivasi sehingga setiap individu anggota organisasi dapat terdorong untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan kader/calon pengurus organisasi. Atau paling tidak pemberdayaan organisasi kepemudaan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan motivasi atau dorongan untuk berprestasi (*need for achievement*).

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan memiliki beberapa faktor-faktor penghambat yaitu: (1) Faktor komunikasi, (2) Faktor sumber daya, (3) Faktor lingkungan kebijakan. Kemudian Bambang Sunggono kembali menjelaskan bahwa terdapat faktor penghambat implementasi kebijakan yang lain, yaitu: Isi Kebijakan, Informasi, Dukungan, dan Pembagian Potensi.

Metode Penelitian

Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan data, kata, dan kalimat yang digunakan. Pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu. Dalam hal ini, sangat penting bagi peneliti yang menggunakan metode kualitatif untuk memastikan kualitas dari proses penelitian, sebab peneliti tersebut akan menginterpretasi data yang telah dikumpulkannya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan dengan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan empat informan. Pertama, Sulaiman selaku ketua Karang Taruna Kelurahan Jatisari. Kedua, Abdurohim Zive selaku ketua Karang Taruna sub unit RW 001 Kampung Bojong Sari. Ketiga, Irsyad selaku Ketua Karang Taruna sub unit RW 005 Kampung Cakung Payangan. Dan Keempat, Irfan Nawawi selaku wakil ketua Karang Taruna sub unit RW 019 Perum. Puri Nusaphala.

Lingkungn RW 001 Kampung Bojong Sari telah berhasil menjalankan Program Karang Taruna Mandiri dengan baik. Abdurohim Zive lewat wawancaranya menyampaikan bahwa Karang Taruna sub unit RW 001 telah berhasil membuat produk sabun pencucui piring hasil olahan tangan dari anggota Karang Taruna sub unit RW 001 yang telah diperjual belikan pada warung-warung yang berada di lingkungan RW 001. Yang berikutnya Karang Taruna sub unit RW 001 juga memiliki usaha sablon baju yang bekerja sama dengan salah satu pengusaha sablon di lingkungan RW 001, kemudian Karang Taruna sub unit RW 001 juga memiliki kegiatan usaha mandiri warung kopi yang diberi nama Warkop Katar 001. Karang Taruna sub unit RW 001 memperoleh support bantuan berupa dukungan maupun sumber pendanaan dari ketua RW 001, warga masyarakat RW 001, para pelaku usaha, dan salah satu warga RW 001 yang kebetulan beliau menjabat sebagai anggota dewan DPRD Jawa Barat Dapil IV dari fraksi partai PAN yaitu ibu Aminah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Irsyad selaku ketua Karang Taruna sub unit RW 005 Kampung Cakung Payangan. Di lingkungan RW 005 Kampung Cakung

Payangan juga telah berhasil menjalankan Program Karang Taruna Mandiri dengan pengimplementasian Karang Taruna sub unit RW 005 memiliki sebuah kegiatan bulanan yaitu penarikan dana CSR dari para pelaku usaha yang berada di lingkungan RW 005 Kampung Cakung Payangan. Kegiatan penarikan dana CSR ini bersifat dari warga dan akan dikembalikan lagi ke warga lewat sebuah kegiatan bersih desa, aspal jalan, mempercantik desa, dan kegiatan lingkungan lain yang semuanya akan dilakukan oleh Karang Taruna sub unit RW 005. Kemudian Karang Taruna sub unit RW 005 juga berhasil membuat loket pembayaran terpadu yang berada di sekretariat Katar 005 yang difungsikan untuk pembayaran PBB, PLN, PDAM, beli pulsa, dll dan untuk petugasnya sendiri adalah anggota Karang Taruna sub unit RW 005.

Namun Karang Taruna sub unit RW 005 mendapatkan hambatan dalam pelaksanaan penarikan dana CSR dikarenakan masih banyak penolakan dan perbedaan pendapat dari warga masyarakat sendiri, padahal ketua RW 005 telah mendukung penuh Program Karang Taruna sub unit RW 005 ini.

Hal yang jauh berbeda justru dikemukakan oleh Irfan Nawawi selaku wakil ketua Karang Taruna sub unit RW 019 Perum. Puri Nusaphala. Lingkungan RW 019 belum dapat menjalankan Program Karang Taruna Mandiri di lingkungan nya. Melalui wawancaranya Irfan Nawawi menyampaikan bahwa RW 019 baru saja terbentuk Karang Taruna sub unit RW untuk pertama kalinya. Berikutnya Karang Taruna sub unit RW 019 tidak mendapatkan dukungan dari ketua RW, warga masyarakat, dan sebagian pengurus RW 019. Selanjutnya RW 019 merupakan lingkungan paling kecil se-Kelurahan Jatisari dengan hanya terdapat 3 RT saja dan hal ini sangat mempengaruhi dalam memperoleh keanggotaan Karang Taruna sub unit RW 019. Irfan Nawawi juga mengatakan terdapat fakta informasi yang kurang baik karena terdapat indikasi perpolitikan pada pembentukan Karang Taruna sub unit RW 019. Hal-Hal tersebut yang menjadi penghambat pelaksanaan Program Karang Taruna Mandiri di lingkungan RW 019 Perum. Puri Nusaphala.

Sulaiman selaku ketua Karang Taruna Kelurahan Jatisari menambahkan informasi lewat wawancaranya bahwa dari total 20 RW yang berada di lingkungan Kelurahan Jatisari baru 10 RW saja yang telah terbentuk Karang Taruna sub unit RW. Dari 10 Karang Taruna sub unit RW tersebut hanya 4 Karang Taruna sub unit RW saja yang telah dapat menjalankan Program Karang Taruna Mandiri

Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian tentang Implementasi Program Kerja Karang Taruna Mandiri kelurahan Jatisari dalam pemberdayaan organisasi pemuda di lingkungan kelurahan Jatisari Kota Bekasi dapat ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa implemementasi Program Kerja Karang Taruna Mandiri kelurahan Jatisari dalam pemberdayaan organisasi pemuda di lingkungan kelurahan Jatisari Kota Bekasi belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya pada Karang Taruna sub unit RW dan pada lingkungan RW yang berada di lingkungan kelurahan Jatisari.

Terdapat 2 faktor yang menghambat pengimplementasian program Karang Taruna Mandiri . Pertama, Faktor internal organisasi Karang Taruna yang dapat dilihat dari masih sulitnya Karang Taruna sub unit RW dalam memperoleh keanggotaan Karang Taruna sub unit RW yang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan dan berintegritas untuk membangun, memajukan, dan mengembangkan lingkungan maupun organisasi Karang Taruna. Kedua, Faktor eksternal organisasi Karang Taruna yang dapat terlihat dari kurang mendapatkan dukungan dari warga masyarakat, ketua RW, dan sebagian pengurus RW mengenai segala jenis program yang dibuat oleh Karang Taruna tingkat kelurahan Jatisari maupun Karang Taruna sub unit RW sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, informan menyampaikan selain faktor penghambat pelaksanaan program Karang Taruna Mandiri juga terdapat faktor pendukung pelaksanaan program Karang Taruna Mandiri. Dalam wawancaranya Abdurohim Zive, ketua Karang Taruna sub unit RW 001 Kampung Bojong Sari menjelaskan para pelaku usaha adalah faktor pendukung dalam pelaksanaan program Karang Taruna Mandiri. Para pelaku usaha selalu memberikan support dukungan berupa lahan usaha dan modal awal pendanaan. Karang Taruna sub unit RW 001 juga mendapatkan bantuan pendanaan dan dukungan penuh dari Ibu Aminah selaku DPRD Jawa Barat Dapil IV dari fraksi partai PAN yang tinggal di lingkungan RW 001 Kampung Bojong Sari.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran yang bisa menjadi masukan dalam mengimplementasikan

Program Kerja Karang Taruna Mandiri kelurahan Jatisari dalam pemberdayaan organisasi pemuda di lingkungan kelurahan Jatisari Kota Bekasi.

Pertama, Memperbaiki dalam penyampaian, cara, gaya, dan media komunikasi antara Karang Taruna tingkat kelurahan dengan Karang Taruna tingkat sub unit RW. Kedua, Melakukan sosialisai dan menjalin silaturahmi mengenai Program Karang Taruna Mandiri yang di lakukan oleh Karang Taruna tingkat kelurahan kepada ketua Karang Taruna sub unit RW, ketua RW, dan warga masyarakat agar Program Karang Taruna Mandiri dapat terealisasi dengan baik di Karang Taruna sub unit RW. Ketiga, Melakukan seleksi dan pelatihan kaderisasi kepemimpinan Karang Taruna agar dapat menghasilkan SDM Karang Taruna yang unggul dan berintegritas baik di Karang Taruna tingkat kelurahan maupun Karang Taruna sub unit RW. Keempat, Merubah pola pikir para pengurus Karang Taruna tingkat kelurahan dalam hal perbedaan setatus sosial Karang Taruna sub unit RW lingkungan perkampungan dengan Karang Taruna sub unit RW lingkungan Perumahan terkait permasalahan SDM Karang Taruna sub unit RW lingkungan perkampungan lebih berintegritas dibandingkan Karang Taruna sub unit RW lingkungan Perumahan. Kelima, Kepada para pemegang kekuasaan terkhusus ketua RW agar selalu memberikan support, bantuan, dan dukungan terhadap segala jenis kegiatan Karang Taruna yang bersifat positif, membangun, dan memajukan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Alwi, Safarudin, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Strategi Keunggulan Kompetitif)*, BPFE, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Buku Pedoman Dasar Karang Taruna, 2017, *Pedoman PHBS bagi Karang Taruna*.
- Creswell, John W, 2002, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ke-3, Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548, Yogyakarta.
- Hutahayan, John Fersly, 2012, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik (studi pada pemerintahan DKI Jakarta)*, Cv Budi Utama, Yogyakarta.

- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Subianto, 2017, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta Bandung, Bandung.
- McClelland, David C, 1987, *Human Motivation*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Moleong, Lexy J, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, Johny Setyawan, 2000, *Sistem Perencana dan Pengendalian Manajemen*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant, 2014, *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rohman, Arif, 2009, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Safaria, Triantoro, 2004, *Kepemimpinan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mixed Methods*, Alfabeta, Bandung.
- Zuhri, Saefudin, 2017, *Deradikalisasi Terorisme (Menimbang Perlawanan Muhammadiyah Dan Loyalitas Nahdatul Ulama)*, penerbit Dakat Press, Jakarta.